



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DANANG KUSWIDODO**
2. Jabatan : **KEPALA SUBDIREKTORAT MANAJEMEN RISIKO**
3. NHK : **57192**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.372.330.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m²/150 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 146 m²/45 m² di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m²/36 m² di KAB / KOTA BANYUWANGI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 2668 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 1.334.000.000
5. Tanah Seluas 663 m² di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 106.080.000
6. Tanah Seluas 1129 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 282.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 175.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5G CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU AYL A B100RS-GMQFJ M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT D1B02N26L2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 311.029.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 600.000.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 994.105.669**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	28.984.862
Sub Total	Rp.	4.481.449.531
III. HUTANG	Rp.	50.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.431.449.531

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.